



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030  
Website : [www.dpmpstsp.pandeglangkab.go.id](http://www.dpmpstsp.pandeglangkab.go.id), e-mail. [dpmpstsp\\_pandeglangkab@yahoo.com](mailto:dpmpstsp_pandeglangkab@yahoo.com)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 503/ 07 -DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) PELAMBOYAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Nomor 421.9/215-Dikbud/2019 Tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan telah memberikan Rekomendasi persetujuan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan untuk diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan berpartisipasi membantu pemerintah Kabupaten Pandeglang mensukseskan program pendidikan nasional dengan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, kelompok bermain mulai dari usia 0-6 tahun, dengan visi membentuk generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berprestasi bertujuan untuk mendidik anak menuju ketaqwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang ....

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pelamboyon Nomor 05/KB Pelam/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB. Pelamboyon di Kampung Cibitung RT.005, RW. 003 Desa Cibitung Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang;

2. Akta Notaris.....

2. Akta Notaris Syahrudin,SH Nomor 96 Tanggal 21 Desember 2011, tentang Akta Pendirian Yayasan Flamboyan;
3. Surat Keterangan Kelayakan dari Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Munjul Nomor 421.1/76-Korwil Dikbud/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 tentang Keterangan Kelayakan untuk diterbitkannya Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan;
4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang 421.9/215-Dikbud/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang memberikan Rekomendasi untuk diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Pelamboyan

Nama Satuan : Kelompok Bermain (KB)  
Pelamboyan

Penyelenggara : Yayasan Flamboyan

Pengelola : Nurhayati,S.Pd.AUD

Alamat : Kp. Cibitung RT/RW. 005/003 Desa  
Cibitung Kecamatan Munjul Kabupaten  
Pandeglang Propinsi Banten.

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Plamboyan, Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelamboyan, Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan harus memenuhi Komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelamboyan, Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;

4. Lembaga Pendidikan ....

4. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelamboyan, Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelamboyan, Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
6. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelamboyan, Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Ketiga : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelamboyan, Kelompok Bermain (KB) Pelamboyan akan ditinjau kembali, apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 29 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PANDEGLANG



HELDA NOVAIDA, SH  
NIP. 19621101 199010 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang